

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

Kallo, Erwin. *Panduan Hukum Untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (kondominium, Apartemen, dan Rusunami)*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.

Kuswahyono, Imam. *Hukum Rumah Susun*, Banyumedia, Malang, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

_____. *Penelitian Hukum. (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ramelan Eman, Andy Hartanto, Agus Sekarmadji, *Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Pembebanan Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.2015.

Santoso, Urip. *Hukum Perumahan*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.

_____. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Aatas Tanah*, Prenada media Grup, Jakarta, 2010.

Sidharta, B. Arief (Penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama, Bandung. 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003.

Tim Penulis Leks&Co, *Hukum Real Estat Bagian I Hukum Pertanahan, Perumahan, dan Rumah Susun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

B. Artikel dalam Jurnal

Supyan, Ina Budhiarti. „Perlindungan Hukum bagi penghuni Satuan Rumah Susun Dibidang Pengelolaan Rumah Susun di Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun“, *Jurnal Wawasan Umum*, Vol 34 , No 1, Februari 2016.

Izzattisselim, Azisyiah. „Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Menuju Kepastian Hukum Penghuni Rumah Susun“, *Jurnal Law Review*, Volume XVIII, No. 3, Maret 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043).

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5252).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3372).

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional No.6/KPTS/BPK4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Irawati. *Perlindungan terhadap hak-hak penghuni rumah susun dalam menggunakan jaringan-jaringan listrik yang merupakan bagian bersama yang diatur dalam undang-undang no. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun*, **Tesis**, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20282696-T21810-Perlindungan%20terhadap.pdf>>

Prayitno, Cuk. *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero*, **Tesis**, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128954-T%2026671-Tinjauan%20yuridis-Literatur.pdf>>

E. Internet

Hutomo, Dimas. “Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdd0eae0914f/pe-mbentukan-perhimpunan-pemilik-dan-penghuni-satuan-rumah-susun>, 17 Mei 2019, dikunjungi 2 September 2019.

Joni. “Menyoal Badan Hukum PPPSRS”, <http://www.rei.or.id/newrei/berita-menyoal-badan-hukum-pppsrs.html> 06 Maret 2019, dikunjungi pada tanggal 4 Desember 2019.

Mjoni. “Siapa Mengelola Rumah Susun Komersial?”, <http://www.mjoni.com/opini/perumahan-dan-perkotaan/siapa-mengelola-rumah-susun-komersial.html>, 6 Oktober 2016, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2019.

Rahman, Arief Mahmoud. “Akibat Hukum Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Jo. Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun”, *Jurnal Hukum*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1137>, Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2015.

Sekarmadji. Agus. “Peran PPPSRS dalam Pengelolaan Rumah Susun”, <http://www.indonesianotarycommunity.com/peran-pppsrs-dalam-pengelolaan-rumah-susun/>, 26 November 2015, dikunjungi pada tanggal 3 November 2019.

- Syahmardan. “Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS)”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/1423-pembentukan-perhimpunan-penghuni-rumah-susun-pprs.html> , dikunjungi tanggal 2 September 2019.
- Tunardy, Wibowo. “Badan Hukum Subjek Hukum” <https://www.jurnalhukum.com/badan-hukum-sebagai-subyek-hukum/>, 26 Mei 2012, dikunjungi pada 28 November 2019.
-
- _____ . “Pengelolaan Rumah Susun”, <http://www.jurnalhukum.com/pengelolaan-rumah-susun/>, 14 Maret 2015, dikunjungi pada tanggal 7 September 2019.
- “Respons APERSI Terkait Aturan Rumah Susun yang Dipersoalkan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c66c2523992d/respons-apersi-terkait-aturan-rumah-susun-yang-dipersoalkan/>, 15 Februari 2019, dikunjungi tanggal 15 Desember 2019.